

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan adanya standar akuntansi yang dapat digunakan pada berbagai negara merupakan hal yang sangat penting. Melalui standar akuntansi tersebut, maka informasi-informasi penting yang ada pada suatu perusahaan dapat dibandingkan dengan informasi milik perusahaan yang ada di negara lain. Selain itu ketentuan-ketentuan yang ada pada standar akuntansi tersebut juga dapat membuat perusahaan tidak dapat menyembunyikan informasi-informasi penting yang wajib disajikan pada laporan tahunannya.

Pada tahun 2012, Indonesia mulai melakukan penerapan standar akuntansi dengan basis IFRS. Namun sebelum memasuki tahun 2012, standar akuntansi dengan basis IFRS ini hanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang telah mampu mengadopsi IFRS. Adanya penerapan standar akuntansi perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat meningkatkan daya saing karena informasi-informasi yang disajikan memiliki kualitas di pasar modal internasional.

Jika suatu perusahaan tidak melakukan pengungkapan informasi-informasi penting yang dimilikinya secara keseluruhan, maka hal tersebut akan merugikan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Seperti kasus yang terjadi pada PT Petromine Energy Trading, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Timah Tbk.

PT Petromine Energy Trading merupakan anak perusahaan dari PT Bakrie & Brothers. PT Petromine Energy Trading melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan penyajian pendapatan yang dihasilkan dari penyediaan bahan bakar kepada AKR Corporindo pada tahun 2011. Pendapatan tersebut memiliki nilai sebesar Rp 1,37 triliun. Adanya kasus tersebut membuat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) memberikan sanksi kepada PT Bakrie & Brothers berupa denda sebesar Rp 4 miliar (<http://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1630743/bapepam-telusuri-salah-catat-laporan-keuangan-bakrie--brothers>, diakses 19 September 2016).

PT Bumi Resources Tbk yang juga merupakan anak perusahaan dari PT Bakrie & Brothers melakukan pelanggaran pada tahun 2012 dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Pada tahun 2011, PT Bumi Resources Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 3,14 triliun. Akibat adanya kerugian tersebut PT Bumi Resources melakukan pemecahan saham. BAPEPAM menilai bahwa PT Bumi Resources melakukan manipulasi tersebut agar perusahaan tidak memiliki kewajiban dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan kepada BAPEPAM. (<http://www.neraca.co.id/article/19651/bapepam-endus-ada-penyelewengan-keuangan-di-grup-bakrie-konflik-internal-manajemen-muncul>, diakses 12 Oktober 2016)

Kasus terakhir yaitu terjadi pada PT Timah Tbk yang melakukan pemalsuan laporan keuangan pada semester 1 tahun 2015. Laporan keuangan perusahaan menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan strategi yang tepat dan

menghasilkan kinerja yang positif, tetapi berdasarkan realita yang terjadi pada semester 1 tahun 2015 PT Timah Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar. Pemalsuan laporan keuangan dilakukan karena PT Timah Tbk ingin menutupi kinerja perusahaannya yang kurang sehat selama tiga tahun terakhir. Kinerja yang kurang sehat dapat terlihat dari meningkatnya hutang perusahaan. Pada tahun 2013, hutang perusahaan sebesar Rp 263 miliar. Namun, hutang yang dimiliki perusahaan meningkat menjadi Rp 2,3 triliun pada tahun 2015. (<http://www.tambang.co.id/pt-timah-diduga-membuat-laporan-keuangan-fiktif-9640/>, diakses 2 November 2016)

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa pengungkapan informasi-informasi mengenai perusahaan merupakan sesuatu yang sangat penting baik untuk perusahaan, pemegang saham maupun pihak lain yang berkepentingan. Khususnya pada perusahaan pertambangan yang cenderung tidak memenuhi pengungkapan informasi penting yang ada pada perusahaannya. Pemanipulasian laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan juga akan merugikan pemerintah, karena perusahaan pertambangan memiliki peran sebagai sumber pendapatan yang cukup besar bagi negara.

Informasi yang diungkapkan laporan tahunan dibagi menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan informasi-informasi secara wajib pada laporan tahunan sesuai dengan yang ditetapkan pada standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan informasi-informasi keuangan yang dapat

membantu dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Adina dan Ion (2008), tujuan adanya *mandatory disclosure* yaitu untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan tahunan dan memastikan kualitas kinerja perusahaan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan IFRS tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengungkapan semua informasi-informasi penting yang ada. Untuk mengontrol informasi-informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, maka dibutuhkan peran dari *corporate governance*. *Corporate governance* yang terdapat pada setiap negara memiliki perbedaan, bergantung kepada peraturan-peraturan yang ada pada negara tersebut dan juga faktor internal dari perusahaan.

Pelaksanaan *corporate governance* merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menghindari permasalahan yang terjadi diantara komisaris dan direktur pada saat proses pengambilan keputusan. Dibutuhkannya *corporate governance* digunakan sebagai pendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan juga konsisten (Novianti, 2009). Oleh karena itu, dalam penelitian ini struktur *corporate governance* yang digunakan yaitu jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Penelitian mengenai tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ini sebelumnya telah dilakukan oleh Al Akra *et al*, (2010). Al Akra *et al*, (2010) meneliti tentang pengaruh dari regulasi pengungkapan akuntansi,

reformasi tata kelola dan perubahan kepemilikan, akibat privatisasi, pada kepatuhan pengungkapan wajib. Sampel yang digunakan sebanyak 80 perusahaan non keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Al Akra *et al*, (2010) ini tidak dapat digeneralisasikan di berbagai negara, hal ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada perusahaan yang ada di Yordania.

Selain penelitian dari Al Akra *et al*, (2010), juga terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh struktur dan mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Penelitian pertama yaitu mengenai pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil penelitian dari Wardani *et al*, (2012) menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan. Hal ini karena jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu besar akan mempersulit proses pengambilan keputusan sedangkan jika jumlah anggota dewan komisaris terlalu kecil maka dewan komisaris tidak memberikan tekanan terhadap dewan direksi sehingga perusahaan tidak terdorong untuk memberikan informasi-informasi wajib yang seharusnya disajikan. Hasil penelitian dari Wardani *et al*, (2012) ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Sutiyok dan Evi (2016). Menurut hasil penelitian dari Sutiyok dan Evi (2016), jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan karena jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan lebih cepat.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Wardani *et al*, (2012) yang memiliki perbedaan hasil dengan hasil penelitian dari Sutiyok dan Evi (2016). Hasil

penelitian dari Wardani *et al*, (2012) menyatakan bahwa variabel jumlah anggota komite audit memiliki hasil signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil signifikan ini disebabkan semakin besar jumlah anggota komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Sedangkan hasil penelitian dari Sutiyok dan Evi (2016) memberikan hasil tidak signifikan. Hasil tidak signifikan ini memiliki alasan bahwa jika jumlah anggota komite audit terlalu banyak maka akan mengurangi tingkat keefektifan kinerja karena dapat menyebabkan sulitnya berkomunikasi dan berkoordinasi antar anggota dan apabila jumlah anggota komite audit terlalu kecil maka dianggap kurang efektif dan dinamis dalam menjalankan fungsinya.

Penelitian selanjutnya yaitu mengenai pengaruh dari variabel jumlah anggota dewan direksi terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Menurut hasil penelitian dari Wardani *et al*, (2012) menyatakan hasil tidak signifikan. Hasil ini didapatkan karena perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia hanya sekedar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga jumlah anggota dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan hasil penelitian dari Sari dan Diah (2015) memberikan hasil yang berbeda yaitu pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan ini memiliki alasan bahwa dewan direksi dianggap sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan termasuk jika terjadi penyimpangan.

Penelitian berikutnya yaitu mengenai pengaruh dari proporsi komisaris independen. Hasil penelitian dari Wulan *et al*, (2012) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Isna (2016) yang memberikan hasil signifikan. Hasil signifikan ini memiliki alasan bahwa dewan komisaris berperan dan bertanggungjawab dalam mengawasi perusahaan serta memastikan transparansi perusahaan kepada publik.

Hasil penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Wulan *et al*, (2012) memiliki perbedaan dengan hasil penelitian dari Sari dan Diah (2015). Penelitian dari Wulan *et al*, (2012) menyatakan adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini disebabkan karena kepemilikan manajerial dinilai dapat memotivasi manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Sedangkan hasil penelitian dari Sari dan Diah (2015) menyatakan hasil tidak signifikan karena masih sedikitnya penerapan kepemilikan saham yang dilakukan oleh manajemen pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Penelitian terakhir yaitu mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil penelitian dari Wulan *et al*, (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang disebabkan oleh adanya monitoring yang dilakukan oleh investor institusional sehingga membuat manajer menyajikan semua informasi yang telah ditetapkan oleh standar. Sedangkan hasil penelitian dari Sari dan Diah (2015) menyatakan adanya pengaruh tidak signifikan.

Hal ini disebabkan karena institusi tidak memberikan perhatian lebih mengenai pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan tetapi institusi lebih memperhatikan informasi-informasi yang digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan perusahaan.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* KONVERGENSI IFRS”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?
2. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?
3. Apakah jumlah anggota dewan direksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?
4. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah anggota dewan direksi terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
5. Untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
6. Untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai struktur dari *corporate governance* dan keterkaitannya dengan kepatuhan pengungkapan wajib.
2. Bagi *stakeholder* dan pihak-pihak yang berkepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan tahunan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.
3. Bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pendorong untuk membuat standar pengungkapan wajib yang lebih baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan ini berisi menjadi lima

bab, setiap bab nya dibagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dan alasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Selain itu pada bab ini juga diuraikan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan secara mendalam mengenai teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, kerangka pemikiran yang dapat memberikan penjelasan mengenai penelitian ini, dan penjelasan mengenai hipotesis yang mendasari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian memberikan penjelasan mengenai rancangan yang digunakan dalam penelitian, batasan penelitian yang menjelaskan ruang lingkup dari variabel yang digunakan, definisi operasional dari setiap variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab gambaran subyek penelitian dan analisis data memberikan penjelasan mengenai gambaran subyek yang diteliti, analisis statistik deskriptif yang dilakukan pada masing-masing variabel independen dan variabel dependen, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, serta pembahasan dari hasil pengujian tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dari data yang telah dianalisis, keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian, dan saran yang diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan pada penelitian yang selanjutnya.

